

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penelitian ini berusaha menarasikan mengenai sebuah gerakan yang dilakukan oleh UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban) dalam melakukan penolakan terhadap aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Gerakan ini berdiri atas dasar pembangunan PLTU yang akan dilakukan di kawasan konservasi Ujungnegoro, demi memperjuangkan tanah milik para petani, kelestarian lingkungan dan kaum tertindas dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas PLTU di Kabupaten Batang.

Paguyuban UKPWR Batang adalah sekelompok masyarakat sipil terdampak pembangunan PLTU yang terdiri dari desa-desa disekitar wilayah konservasi yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban. Sementara PLTU Batubara Batang merupakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang merupakan bagian dari proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Jika berdiri, megaprojek ini diklaim sebagai PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 megawatt. Konsorsium PT. BPI yang terdiri dari satu perusahaan nasional PT. Adaro Power, dan dua perusahaan Jepang, Itochu dan J-Power, mendapatkan jaminan dari Bank Dunia melalui Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan pinjaman dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan Sumitomo Mitsui.

Pada tahun 2010, pertumbuhan permintaan listrik di Jawa Tengah baru mencapai 6,5%, namun pertumbuhan permintaan listrik meningkat hingga mencapai rata-rata 7-8% pertahun, sementara pembangkit listrik yang ada di Jawa Tengah, seperti Tanjung Jati, Rembang, Cilacap dan Tambak Lorok belum mencukupi permintaan pasokan listrik untuk pulau Jawa saat ini¹. Tambahan pembangkit listrik perlu ditambah karna untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Energy listrik merupakan salah satu elemen penting untuk kelangsungan hidup. Guna menopang kinerja dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan energy listrik akan semakin meningkat.

Dari pihak PT. PLN memiliki keterbatasan dalam berinvestasi di sektor kelistrikan sehingga direncanakan dengan pola kerjasama pemerintah dengan swasta yaitu PT. Bimasena Power Indonesia (perusahaan patungan antara J-Power, Adaro, Itochu) selaku perusahaan pemenang tender proyek yang akan membiayai pembangunan PLTU berkapasitas 2x1000 Megawatt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan memanfaatkan wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah daratan akan menempati Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sementara wilayah lautan akan menempati daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban. Padahal daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban telah di tetapkan sebagai kawasan lindung nasional berupa Taman Wisata Alam Laut (TWAL),

¹Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2012. Antisipasi Peningkatan Kebutuhan. PLN. Segera Proses PLTU Jawa Tengah. <http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/3380-antisipasi-peningkatan-kebutuhan-pln-segera-proses-pltu-jawa-tengah.html>.

berdasarkan Lampiran VIII Nomor 311 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 46 ayat (2) Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 dan juga sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berupa kawasan perlindungan terumbu karang berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011.

Sejak awal rencana pembangunannya, megaprojek ini telah mendapatkan penolakan dari warga sekitar lokasi pembangunan proyek dan kalangan masyarakat sipil, seperti Greenpeace Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Menurut kajian Greenpeace Indonesia, PLTU Batubara Batang akan melepas emisi karbon pemicu perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun, atau lebih besar dari emisi negara Myanmar pada tahun 2009. Selain emisi karbon, PLTU ini juga diperkirakan akan melepas emisi merkuri sekitar 200 kilogram pertahun, jumlah yang sangat besar untuk mencemari perairan Batang dan menghancurkan sektor perikanan Pantai Utara Jawa.²

Merujuk pada teori terbentuknya aksi-aksi kolektif atau gerakan sosial yang dikemukakan oleh Giddens, Kornblum, berikut Light, Keller, dan Calhoun sebagaimana dikutip oleh Rizal A. Hidayat, menekankan pada penderitaan deprivasi (kehilangan, kekurangan dan penderitaan), misalnya dibidang ekonomi (hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan).³

² Siaran Pers, JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang , [http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang _ Greenpeace Indonesia.htm](http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC_Pertimbangkan_Pembatalan_Rencana_Pendanaan_PLTU_Batang_Greenpeace_Indonesia.htm), pada tanggal 3/3/2017 pukul 19:42

³ Rizal A. Hidayat, "Gerakan Sosial sebagai Agen Perubahan Sosial", *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, Vol.4, No.1. Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm 15

Pembangunan selalu digambarkan dengan upaya menghadirkan kesejahteraan. Ketika investasi pembangunan masuk dalam suatu daerah, dipercaya dapat membawa kesejahteraan berupa, sumbangan pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar daerah pembangunan. Namun, dalam beberapa kasus pembangunan pun selalu dibarengi dengan penolakan dari masyarakat yang daerahnya akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan, seperti Pembangunan Pulau buatan di Bali/Reklamasi Teluk Benoa Bali, pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang dan pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo.

Penolakan warga terhadap PLTU Batubara Batang ini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih. Akibat penolakan warga yang konsisten ini, maka rencana pembangunan PLTU Batang di wilayah Ujungnegoro-Roban, Batang ini telah tertunda selama lima tahun. Hambatan terbesar yang mengganjal megaproyek ini adalah penolakan warga untuk menjual lahannya kepada Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI), sebagai pihak swasta yang memenangkan tender proyek ini. Penolakan warga didasari kekuatiran kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani dan nelayan, dan juga potensi kerusakan lingkungan serta polusi udara dari PLTU Batubara jika proyek tersebut dipaksakan dibangun di desa mereka.

Kawasan konservasi laut sepanjang pantai Ujungnegoro sampai pantai Roban kini di geser oleh Pemerintah Daerah guna kelancaran megaproyek ini. Kepentingan umum menjadi dalih pengusuran petani dan nelayan di sekitar megaproyek PLTU. Ada 5 desa yang terkena dampak langsung oleh pembangunan proyek ini, yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng,

Wonokerso dan Roban. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penolakan dari masyarakat. Kelima desa inilah yang kemudian secara terang-terangan membuat aliansi yang sebagian besar adalah para petani dan nelayan sebagai penolakan pembangunan megaproyek PLTU dengan sebutan UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban). Mereka adalah sebagian besar masyarakat yang memiliki tanah di sekitar pembangunan megaproyek PLTU.

Memang dari pihak BPI sudah melakukan sosialisasi terkait pembangunan megaproyek PLTU, namun sosialisai pertama dan seterusnya rencana pembangunan langsung mendapat penolakan dari warga. Warga juga sudah melihat secara langsung dan berkaca pada penderitaan masyarakat Cilacap, Jepara dan Cirebon. Ada begitu banyak efek yang terjadi, seperti debu bertebaran dimana-mana dan akan mengganggu pernafasan serta mengganggu lahan pertanian di sekitar PLTU. Sejak 2011 pihak BPI berulang kali menawarkan berbagai cara agar tanah mereka mau untuk di jual. Ada yang menawarkan harga tanahnya dibeli 2x lipat dari harga biasa bahkan beberapa warga mendapatkan surat kaleng yang berisikan tentang ancaman untuk dirinya, namun warga tetap bersikukuh menolaknya.

Meski masih terkendala pembebasan lahan pada tanggal 28 Agustus 2015 pembangunan PLTU sudah mulai berjalan setelah bapak Presiden Republik Indonesia, bapak Jokowi meletakkan batu pertamanya sebagai simbol dimulainya pembangunan PLTU. Setelah berbagai bujukan di keluarkan, namun tetap mendapat penolakan. Pada hari Selasa 20 September 2016, pihak BPI membuat pagar seng sepanjang 5 kilometer untuk menghalangi jalan persawahan yang dimiliki oleh warga. Seng memang sudah di pasang, wargapun tetap

berusaha ingin masuk ke area persawahannya dengan cara merusaknya. Begitu saja setiap hari.

Sikap dari masing-masing masyarakat baik dukungan maupun penolakan memiliki alasan tersendiri. Alasan ini muncul sebagai hasil dari pengetahuan, pemikiran, informasi, pemahaman, maupun pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini pendidikan sangat memengaruhi pola pikir, karena adanya transfer informasi dari berbagai kalangan dan sumber. Aspirasi masyarakat sangatlah penting dan harus diperhatikan, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Karena pada dasarnya baik manfaat maupun dampak dari pembangunan PLTU akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar area tersebut khususnya. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan PLTU ini diharapkan khususnya.

Hal tersebut menarik karena begitu kuatnya masyarakat yang tetap bersikukuh untuk mempertahankan tanahnya yang kini sudah di klaim oleh pihak PT.BPI sebagai tanah guna pembangunan PLTU. Berdasarkan hal tersebut, perlawanan masyarakat UKPWR terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, merupakan hal menarik untuk di teliti dan tentunya akan menambah pemahaman baru.

B. Rumusan Masalah

Dari sedikit penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana motivasi dan bentuk ekspresi perlawanan masyarakat UKPWR terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui penyebab masyarakat menolak adanya pembangunan PLTU batubara.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat UKPWR dalam penolakan pembangunan PLTU di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan diskursus Gerakan Sosial di Indonesia dengan melihat konteks lokal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara pandang baru mengenai bagaimana gerakan sosial oleh kelompok UKPWR dalam menolak pembangunan PLTU.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama skripsi Indra Sanjaya (2015) tentang Gerakan Anti Tambang Lumajang (Studi Kasus: Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Penelitian yang berfokus pada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Laskar Hijau sebagai organisasi lingkungan terhadap aktivitas pertambangan pasir di Lumajang. Dengan memahami pola-pola gerakan sosial yang dilakukan oleh Laskar Hijau dalam merespon aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Beberapa bentuk perlawanan Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih adalah *pertama*, bentuk perlawanan melalui dialog dengan pemerintah, bentuk

perlawanan tersebut mengalami perubahan dikarenakan capaian tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan maksimal serta tanggapan dari pemerintah tidak sesuai yang di inginkan oleh Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih. *Kedua*, demonstrasi masa menjadi bentuk perlawanan dominan selanjutnya. Bentuk perlawanan ini dipilih sebagai respon terhadap pemerintah dan pihak PT Antam serta warga pro tambang. Demonstrasi masa dilatarbelakangi oleh adanya kriminalisasi dan penganiayaan terhadap warga anti-tambang. Episode perlawanan ini mengalami tiga periode yang berbeda dengan membawa isu yang berbeda pula. *Terakhir*, penanaman sebagai bentuk aksi damai dan penegasan bahwa Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih tetap menolak pertambangan di desanya serta sebagai bukti bahwa Wotgalih akan lebih sejahtera bila dikelola sebagai lahan pertanian.⁴

Penelitian Kedua dilihat dari skripsi Indah Kurnia Dewi (2017). Tentang Mediasi Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016. Perebutan pertambangan galian C terjadi antara Dul Ahmad (pemilik izin baru) dengan Ahmad Muhidin Sugiman (pemilik izin lama). Konflik ini mulai muncul sejak pemilik izin lama mengetahui bahwa pengajuan izin pertambangan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ditolak dan surat rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga dicabut. Pertambangan merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki Negara Indonesia. Dari semua jenis golongan pertambangan mempunyai

⁴ Lihat Skripsi Sanjaya, Indra 2015. *Gerakan Anti Tambang Lumajang (Studi Kasus: Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)*. Hlm 1

nilai ekonomi berbeda-beda namun tetap bernilai ekonomi tinggi. Tidak heran apabila kegiatan pertambangan rawan dengan terjadinya konflik.

Penelitian ketiga dari Jurnal Suharno tentang Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Konflik sosial antara PT SMS dan masyarakat adat Sedulur Sikep terjadi sebagai akibat dari upaya pemanfaatan batu kapur untuk pabrik semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sejak tahun 2010. Dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber media cetak dan *online*, serta merujuk pada model pemetaan konflik Wehr, artikel ini berupaya untuk memetakan konflik tersebut. Bagi korporasi, batu kapur bisa ditambang dan memiliki nilai ekonomi tinggi; sedangkan bagi masyarakat adat, batu kapur harus dilestarikan karena di bawahnya terdapat cadangan air yang penting bagi usaha pertanian. Dari tahun 2010 hingga 2014, Sedulur Sikep dan jejaring pendukungnya selalu menolak pendirian pabrik semen. Pada saat yang sama, PT SMS melakukan sosialisasi dan menyusun dokumen analisis dampak lingkungan. Setelah terbit Izin Lingkungan oleh Bupati Pati pada akhir 2014, kedua pihak berhadapan di dua tingkat pengadilan tata usaha negara, yakni PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya. Putusan pengadilan belum mampu mengakhiri konflik ini. Peluang penyelesaian konflik bergantung pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diputuskan oleh Presiden sebagai acuan bagi semua pihak yang akan menambang batu kapur di pegunungan Kendeng Utara, Jawa Tengah.

Penelitian Keempat Jurnal M. Hijran Saputro tentang Analisis Anatomi Gerakan Kontra Rencana Megaproyek PLTU Kabupaten Batang. Dalam penelitian Hijran Saputro dapat dilihat bahwa: *pertama*, gerakan UKPWR muncul

sebagai respon atas kekuatan negara dan pasar yang pada era modern ini sudah sedemikian merasuknya kedalam masyarakat dan menghambat kebebasan pribadi untuk mengembangkan diri. *Kedua*, paradigma gerakan berbeda jauh dengan marxisme, pergerakannya pada umumnya bersifat nonkelas dan perhatiannya ditekankan tidak selalu pada hal materialistik. *Ketiga*, membatasi diri pada aksi sosial dengan semangat radikalisme membatasi diri. *Keempat*, citacitanya bersifat plural.

Penelitian Kelima adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Choiril Anam, tentang Gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017. Penelitian ini menjadi menarik karena gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) menunjukkan sikap kritis masyarakat yang didasari atas ketidakpuasan terhadap permasalahan yang menjadi isu menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang hanya ada satu calon saja sehingga muncullah gerakan sosial ini.

Hasil kajian menunjukkan AKDPP sebagai gerakan sosial karena menggunakan beberapa indikator yaitu: *Tantangan Kolektif*, *Tujuan Bersama* dan *Identitas Kolektif* serta *Memelihara Politik Perlawanan*. Bentuk kolektif yang merupakan upaya melakukan perubahan dilakukan AKDPP adalah dengan sosialisasi dan kampanye, pengawas pemungutan dan perhitungan suara dalam Pilkada, serta menggugat hasil Pilkada. Sosialisasi dan kampanye dilakukan berinteraksi dengan masyarakat seperti bakti sosial terhadap korban banjir, membuat baliho, membuat pamflet berisi artikel/opini dan memperluas jaringan melalui media sosial facebook. Tujuan bersama dalam AKDPP adalah memenangkan kotak kosong sebagai strategi untuk menghadirkan pasangan calon

petahana yang dianggap tidak pro rakyat dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebagai pembentukan identitas dan solidaritas dalam AKDPP adalah kesamaan tujuan yang dimiliki oleh relawan yang tergabung mendukung kotak kosong. Berbagai upaya dilakukan AKDPP untuk memelihara politik perlawanan, memasang kembali alat peraga yang diturunkan, mengelabui aparat desa demi berlangsungnya acara, membentuk pengawas di TPS sebagai ganti saksi yang tidak dimiliki oleh kotak kosong, bahkan sampai mengadakan gugatan terhadap Pilkada.

Tabel 1.1

Tabel penelitian-penelitian terdahulu dari gerakan sosial dan konflik

No	Nama	Judul	Metode	Temuan Masalah
1	Indra Sanjaya (2017)	Gerakan Anti Tambang Lumajang (Studi Kasus: Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan	Metode Kualitatif	bentuk perlawanan Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih adalah <i>pertama</i> , bentuk perlawanan melalui dialog dengan pemerintah, bentuk perlawanan tersebut mengalami perubahan dikarenakan capaian tujuan yang diharapkan. <i>Kedua</i> , demonstrasi masa menjadi bentuk

		Yosowilangun Kabupaten Lumajang)		<p>perlawanan dominan</p> <p>Bentuk perlawanan ini dipilih sebagai respon terhadap pemerintah dan pihak PT Antam serta warga pro tambang.</p> <p>Demonstrasi masa dilatarbelakangi oleh adanya kriminalisasi dan penganiayaan terhadap warga anti-tambang.</p> <p><i>Terakhir</i>, penanaman sebagai bentuk aksi damai dan penegasan bahwa Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih tetap menolak pertambangan</p>
2	Indah Kurnia Dewi (2017)	Tentang Mediasi Konflik Pertambangan Galian C di Desa	Metode Kualitatif	<p>Perebutan pertambangan galian C terjadi antara Dul Ahmad (pemilik izin baru) dengan Ahmad Muhidin Sugiman (pemilik izin lama).</p>

		Karanggedan g Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2013- 2016.		Konflik ini mulai muncul sejak pemilik izin lama mengetahui bahwa pengajuan izin pertambangan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ditolak dan surat rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga dicabut
3	Suharno	Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah.	Metode Kualitatif	Konflik sosial antara PT SMS dan masyarakat adat Sedulur Sikep terjadi sebagai akibat dari upaya pemanfaatan batu kapur untuk pabrik semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sejak tahun 2010.
4	Muhammad Hijran Saputra	Analisis Anatomi Gerakan	Metode Kualitatif	Gerakan UKPWR muncul sebagai respon atas kekuatan negara dan

		Kontra Rencana Megaproyek PLTU Kabupaten Batang.		pasar yang pada era modern ini sudah sedemikian merasuknya kedalam masyarakat dan menghambat kebebasan pribadi untuk mengembangkan diri.
5	Muhammad Choiril Anam	Gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017	Metode Kualitatif	Gerakan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) menunjukkan sikap kritis masyarakat yang didasari atas ketidakpuasan terhadap permasalahan yang menjadi isu menjelang pemilihan kepala daerah serentak yang hanya ada satu calon saja sehingga muncullah gerakan sosial ini.

Dalam penelitian terdahulu peneliti dapat melihat dan mempelajari berbagai bentuk gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ketika menghadapi adanya

gerakan sosial di tingkat nasional maupun local. Penelitian yang telah dilakukan hamper sama dengan yang dilakukan hamper sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu tentang gerakan sosial akan tetapi berbeda dalam hal studi dan kasus yang diteliti.

Melihat dari kajian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang gerakan sosial yang muncul dalam adanya pembangunan PLTU terbesar se-Asia Tenggara di Kabupaten Batang.

F. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan di sini adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan analisa deskriptif suatu fenomena agar menjadi lebih jelas dan sistematis serta ilmiah dalam menjelaskan kegagalan di lapangan. Seperti halnya yang dikatakan Masri Singarimbun bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial, sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁵ Dengan kata lain teori adalah sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial-politik atau alam. Dalam penelitian di gunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, yakni:

1. Gerakan Sosial

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Giddens (1933) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama melalui

⁵ Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, "*Metode Penelitian Survey*", Jakarta: LP3ES, 1989, hal 37.

tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan⁶.

Sedangkan menurut Tarrow (1998) yang menempatkan Gerakan Sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini di dukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digunakan oleh resonansi cultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial⁷.

Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung didalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa pertentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi- institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang

⁶ Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.10, No.1*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm 3

⁷Tarrow, S. In F. Putra, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Hal 22

awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti Negara⁸. Pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan, ketidakadilan, perampasan hak, dan tindakan kekerasan oleh penguasa atau negara. Tanpa adanya ketidakpuasan, gerakan sosial pun tidak mungkin tercipta. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial, dan digaungkan atau disuarakan oleh resonansi kultural, dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan menjadi matang, dan melahirkan gerakan sosial yang berupa pemberontakan⁹.

Terdapat beberapa pendekatan untuk memahami teori-teori gerakan sosial. Hasanudin menjelaskan beberapa pendekatan teoritis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu diantara empat faktor ini: ketidakpuasan, sumber daya, peluang politis, atau proses-proses konstruksi pemaknaan. Selain itu gerakan sosial telah dikonseptualisasikan sebagai epifenomena dari *societal breakdown* (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain, atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru)¹⁰. Penekanan pada faktor ketidakpuasan bersesuaian dengan teori perpecahan (*breakdown theories*); sumber daya dan peluang cocok dengan pandangan tentang gerakan sebagai tindakan politik dengan cara lain dan konstruksi makna dan pembentukan identitas adalah konsep yang serumpun¹¹.

Faktor penyebab terjadinya gerakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Giddens Kornblum, berikut Light, Keller dan Calhoun menekan pada penderitaan devripasi (kehilangan, kekurangan dan penderitaan), misalnya dibidang ekonomi

⁸*Ibid*, hal 23

⁹ Syamsu A. Kamaruddin. Pemeberontakan Petani Unra 1943, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol.16, No.1, Makasar: Universitas Veteran Republik Indonesia, 2012, hal 22

¹⁰Hasanudin.*Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*. Hal 62

¹¹*Ibid*, hlm 62

(hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan).¹² Menurut James Davies dengan konsep devriasi relatifnya mengemukakan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi. Kesenjangan antara pemenuh kebutuhan yang diinginkan masyarakat dengan apa yang diperoleh secara nyata, inilah yang dinamakan deprivasi relatif¹³.

Untuk memahami konsep gerakan sosial, kita tidak dapat melepaskan konsep *proses terbentuknya masyarakat* dalam kemunculan gerakan sosial. Sifat imanen dari gerakan sosial dan kondisi-kondisi sosial dasar yang menumbuhkan gerakan sosial cenderung terletak begitu dalam dan tak terpisahkan dengan kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik struktur sosial yang relative permanen, yang secara umum tak terelakan dan terus ada dalam proses pembentukan masyarakat¹⁴. Kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik sosial merupakan sesuatu yang inheren dalam hakekat pembentukan masyarakat dan organisasi sosial¹⁵.

Menjadi sebuah masyarakat merupakan sebuah proses yang melibatkan bukan saja sebuah peningkatan perlindungan dan keamanan kelompok-kelompok dan individu-individu dalam latar masyarakat yang bersifat konsensus, namun juga melibatkan proses pengikisan kebebasan dan kemerdekaan memilih pada diri individu. Penggunaan kekuatan koersif dan tirani oleh beberapa individu dan kelompok untuk mengkoloni manusia-manusia bebas yang terpencah-pencah dalam sebuah sistem pendudukan, kontrol, dan hukuman menjadi bahan material

¹² Rizal A. Hidayat, "Gerakan Sosial sebagai Agen Perubahan Sosial", *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, Vol.4, No.1. Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm 15

¹³ *Ibid*, hlm 15

¹⁴ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2012, hlm 16

¹⁵ *Ibid*, hlm 16

dasar (yang bersifat konflikual) yang secara umum ada dalam proses pembentukan masyarakat manusia¹⁶. Kekuatan-kekuatan inilah yang secara umum melahirkan konsepsi tatanan sosial.

Sistem koersi dan kontrol, dan penerapannya pada individu-individu dengan mengatasnamakan tatanan sosial, perdamaian dan harmoni sosial memiliki kecenderungan yang tak terelakan untuk menghasilkan sistem pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial, pada gilirannya akan menghasilkan sebuah situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan dan pemberontakan menentang system-sistem dominasi tersebut¹⁷.

Dalam perkembangannya, tidak semua aksi-aksi kolektif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. Bagi Tarrow, konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar¹⁸.

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan symbol yang berbeda atau baru.

¹⁶ *Ibid*, hlm 18

¹⁷ *Ibid*, hlm 19

¹⁸ Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vo.10, No.1, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm 5-7

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

b. Tujuan bersama

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan identitas kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus,

perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

d. Memelihara politik perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Dengan demikian, gerakan sosial perlu dibedakan dengan aksi-aksi kolektif. Setidaknya gerakan sosial memiliki empat properti dasar yang ditawarkan Tarrow diatas. Selain itu, pembeda antara gerakan sosial dan aksi kolektif lainnya yaitu, gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir yang mempunyai misi khusus dalam setiap aksinya dan memiliki strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Gerakan sosial juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dalam pembentukannya dan orang-orang yang terlibat didalamnya.

Terakhir, gerakan sosial cenderung bertahan lama dan bisa berlangsung sampai kurun waktu bertahun-tahun¹⁹.

Dalam proses kemunculannya, gerakan sosial mengalami beberapa tahapan. Proses tahapan sebuah gerakan sosial, adalah meliputi²⁰: *pertama*, tahap ketidaktentraman (keresahan), ketidakpastian dan ketidakpuasan yang semakin meningkat; *kedua*, tahap perangsangan, yakni ketika perasaan ketidakpuasan sudah semakin memuncak. Penyebabnya sudah diidentifikasi dan ada ajakan serta petunjuk-petunjuk dari kalangan tokoh sebagai pembangkit semangat emosi masa; *ketiga*, tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa dan taktik telah dimatangkan; *keempat*, tahap institusionalisasi, yakni ketika organisasi diambil alih dari pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideology serta rencana telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir dari kegiatan gerakan sosial; *kelima*, tahap pembubaran (disolusi), yakni ketika gerakan itu berubah menjadi organisasi atau justru mengalami pembubaran.

Gerakan sosial memiliki beberapa jenis tipe gerakan. David Aberle memberikan empat tipe gerakan sosial dengan menggunakan kriteria perubahan yang dikehendaki. Tipologi Aberle adalah, *alternative movement*, merupakan gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perseorangan; *redemptive movement*, tipe gerakan ini lebih luas dari alternative movement, karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang; *reformative movement*, merupakan gerakan yang hendak mengubah masyarakat hanya dalam

¹⁹ I Putu Dedy Wiguna, dkk, "Implikasi Gerakan People's Alliance For Democracy", Bali: Universitas Udayana, hlm 3

²⁰ Syamsu A. Kamaruddin. Pemeberontakan Petani Unra 1943, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol.16, No.1, Makasar: Universitas Veteran Republik Indonesia, 2012, hlm 22

lingkup segi-segi dalam masyarakat; *transformative movement*, merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh.

Sedangkan Kornblum memberikan klasifikasi gerakan sosial yang menekankan pada aspek tujuan gerakan yang hendak dicapai sebagai berikut²¹: *revolutionary movement*, merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengubah institusi dan stratifikasi masyarakat; *reformist movement*, gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mengubah sebagian institusi dan nilai; *conservative movement*, gerakan yang berupaya untuk mempertahankan nilai dan institusi masyarakat; dan terakhir adalah *reactionary movement*, gerakan yang tujuannya adalah untuk kembali ke institusi dan nilai masa lampau dan meninggalkan institusi dan nilai masa kini.

2. Konflik

a. Teori Konflik

Dilihat dari sejarah umat manusia, konflik sesungguhnya bukanlah hal yang baru, keberadaan konflik setara dengan peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini baik itu konflik antar individu maupun kelompok. Jika konflik antara perorangan tidak bisa diatasi secara adil dan profesional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antar kelompok. Untuk itu, konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Fenomena konflik tersebut mendapat perhatian bagi manusia,

²¹*Ibid*, hlm 16

sehingga muncul penelitian-penelitian yang menciptakan dan mengembangkan berbagai pandangan tentang konflik.

Pengertian konflik menurut Johan Galtung konflik merupakan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran. Konflik sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru. Menurut Johan Galtung, konflik dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: kontradiksi, sikap dan perilaku.

Sikap merupakan tingkah laku dari individu atau kelompok atau organisasi yang berkonflik. Sikap seseorang atau masyarakat tersebut terdapat sifat atau sikap yang memicu timbulnya konflik. Perilaku yaitu tindakan atau perbuatan seseorang, kelompok atau organisasi yang juga menimbulkan konflik. Sedangkan kontradiksi atau konteks adalah kemunculan situasi dan kondisi dari perilaku dan sikap seseorang, kelompok atau organisasi. Jadi antara sikap perilaku dan konteks ini akan terus bergantian dan melahirkan problem-problem sosial.²²

Pemetaan konflik dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam Ruang-ruang konflik. Kriteria-kriteria ruang konflik tersebut menurut Fuad & Maskanah terbagi kedalam 5 ruang konflik yakni:²³

1. *Konflik data*, terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai data yang relevan menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.

²² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*”, (Yogyakarta: kreasi Wacana) 2011. Hal :83

²³Fuad, F. H & S. Maskanah. “*Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*”, Pustaka LATIN. Bogor 2000. Hal :16

2. *Konflik kepentingan*, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan terjadi karena masalah yang mendasar atau substansif (misalnya uang dan sumberdaya) masalah tatacara (sikap dalam menangani masalah) atau masalah psikologi (persepsi atau rasa percaya, keadilan rasa hormat).

3. *Konflik hubungan antar manusia*. Terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang berulang (repetitif). Masalah-masalah ini sering menimbulkan konflik yang tidak realistis atau yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

4. *Konflik nilai* disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian baik yang hanya dirasakan maupun memang nyata.

5. *Konflik struktural*, terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan control terhadap sumber daya, pihak yang berkuasa dalam dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya memiliki peluang untuk meraih akses dan melakukan control sepihak terhadap pihak lain.

Dalam konteks ini, konflik sesungguhnya dapat dipahami dalam 2 perspektif yang berbeda. Pertama, konflik dapat dianggap sebagai sebuah patologi sosial akibat kegagalan sebuah proses integrasi suatu masyarakat atau komunitas. Patologi sosial dapat sangat mungkin terjadi apabila kepentingan golongan, kelompok, atau komunitas di atas kepentingan bersama mencuat. Kedua, konflik ini dilihat dari segi “fungsional”-nya yakni sebuah mekanisme untuk menyempurnakan proses integrasi sosial. Dalam pemahaman ini konflik

dipandang sebagai sebuah cara untuk menghilangkan berbagai elemen disintegrasikan dalam rangka untuk membentuk suatu komunitas yang solid.

b. Jenis-jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya, dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik. Konflik dibedakan menjadi dua yaitu, (Konflik Konstruktif dan Konflik Destruktif) dan (Konflik realitas dan Konflik Non Realitas).

a. Konflik Realitas dan Konflik Non Realitas.

Menurut Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Flogerdan Marshal S. Poole (1984) mengelompokkan konflik menjadi konflik realitas dan konflik non realitas.

1. Konflik realitas, konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik jenis ini interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Disini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah dialog, persuasi, musyawarah, voting dan negosiasi. Kekuasaan dan agresi sedikit sekali digunakan.

2. Konflik non realistis, Konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal

yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawanya. Oleh karena itu, metode manajemen konflik yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan. Contoh jenis konflik ini adalah konflik karena perbedaan suku dan ras, yang sudah menimbulkan kebencian yang mendalam.²⁴

b. Konflik Destruktif dan Konflik Konstruktif

Konflik juga dapat dikelompokkan menjadi konflik konstruktif (konflik produktif) dan konflik destruktif (konflik kontraproduktif).

1. Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik; atapun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik secara fleksibel menggunakan berbagai teknik manajemen konflik, seperti negosiasi give and take, humor, bahkan voting untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2. Konflik Destruktif

Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik di definisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang

²⁴Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik; Teori Aplikasi dan Penelitian. 2013. Hal:59

sesungguhnya. Konflik destruktif sulit diselesaikan karena stakeholder ini berupaya saling menyelamatkan muka mereka.²⁵

Tabel 1.2

Karakteristik Konflik Konstruksi dan Desktruktif²⁶

Konflik Konstruktif	Konflik Destruktif
<ul style="list-style-type: none"> • Berusaha menyelesaikan perbedaan mengenai substansi konflik • Berhasil mendefinisikan dan mengklarifikasi permasalahan konflik • Komunikasi dan negosiasi insentif untuk menjelaskan posisi masing-masing • Berupaya mengendalikan emosi, marah kekhawatiran, dan stress. • Negosiasi Give and take • Spiral konflik mengerucut kearah kompromi atau kolaborasi • Berupaya mencari win & win solution yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Polarisasi perbedaan • Berkurangnya kerjasama • Konflik tidak berpusat pada substansi konflik • Terjadi spiral konflik yang makin membesar dan meninggi • Perilaku merendahkan lawan konflik • Perilaku mengancam • Perilaku konfrontasi dan mengancam • Ketegangan, kekhawatiran, stress, dan agresi • Negosiasi minimal

²⁵ *Ibid*, Hal: 60-62

²⁶ Op cit hlm 22 - 23

	<ul style="list-style-type: none"> • Gaya manajemen konflik kompetisi • Mengalami krisis • Menginginkan win & win solution • Merusak hubungan • Menyelamatkan muka
--	---

Sumber: Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik; Teori Aplikasi dan Penelitian 2013.

c) Konflik Fungsional dan Konflik Disfungsional

Berdasarkan fungsinya, Robbins (1996:430) membagi konflik menjadi dua yaitu konflik fungsional (Functional Conflict) dan konflik disfungsional (Dysfunctional Conflict);

1. Konflik fungsional

Konflik Fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok konflik fungsional bersifat konstruktif dan membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi. Konflik ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras bekerjasama dan lebih kreatif. Konflik ini berdampak positif atau dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang bersangkutan.

2. Konflik Disfungsional

Konflik disfungsional adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Konflik disfungsional bersifat destruktif dan dapat menurunkan kinerja organisasi. Konflik disfungsional dapat diartikan setiap konfrontasi atau interaksi diantara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

c. Tujuan Konflik

Secara umum tujuan konflik adalah pertama, dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber daya tertentu. Salah satu dari banyak ciri manusia hidup adalah manusia membutuhkan dan memerlukan sumber-sumber daya yang bersifat material-jasmania maupun spiritual-rohania untuk dapat hidup secara layak. Usaha untuk memperoleh sumber-sumber daya tersebut diantaranya adalah dengan cara berkonflik, baik melalui tindakan yang positif (berkompetisi) atau dengan negatif (agresi terhadap hak milik orang lain). Kedua, tujuan konflik adalah untuk mempertahankan sumber-sumber daya yang selama ini telah di miliknya. Dalam konteks ini manusia berusaha untuk memelihara sumber-sumber daya yang telah jadi milik mereka dan cara mempertahankannya dari orang-orang ataupun pihak lain yang ingin merebutnya.

d. Tahapan Konflik

Untuk memahami dan mendalami konflik yang terjadi diperlukan adanya alat bantu untuk menganalisis konflik salah satunya adalah tahapan konflik. Karena konflik dapat berubah setiap saat melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini adalah:

1. Prakonflik

Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui proses terjadinya konfrontasi, tetapi terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

2. Konfrontasi

Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan, mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua belah pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada profokasi di antara para pendukung di masing-masing pihak.

3. Krisis

Ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.

4. Akibat

Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Salah satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan genjatan senjata (jika perang terjadi). Satu pihak mungkin menyerah atas desakan dari pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Adapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

5. Pasca Konflik

Akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.

G. Definisi Konseptual

a. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk dari aksi kolektif. Suatu aksi kolektif dapat dikatakan sebagai suatu gerakan sosial apabila didalamnya terdapat unsur-unsur yang meliputi: kegiatan bersifat berkelanjutan, memiliki tujuan untuk menghambat atau mendorong suatu perubahan dalam masyarakat.

b. Teori Konflik

Konflik merupakan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran. Konflik sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru.

H. Definisi Oprasional

Untuk menjelaskan lebih rinci mengenai gerakan yang dilakukan oleh UKPWR, maka peneliti memakai beberapa indikator sebagai berikut:

A. UKPWR sebagai Gerakan Sosial

1. Memiliki tantangan Kolektif
2. Mempunyai tujuan bersama
3. Memiliki solidaritas dan identitas kolektif
4. Memelihara Politik Perlawanan

B. Dinamika Perlawanan UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang

1. Rencana Pembangunan PLTU dan Respon Masyarakat di Kabupaten Batang
2. Eskalasi Konflik
 - a. Bentuk-bentuk Perlawanan UKPWR
 - b. Motivasi UKPWR dalam penolakan pembangunan PLTU
3. Munculnya Konflik Baru

C. Dinamika Gerakan Sosial UKPWR

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertimbangan pemilihan metode kualitatif sebagai alat pegangan bagi penelitian ini dalam melihat realitas adalah untuk dapat menggali secara mendalam sebuah fenomena yang ada. Sebab penelitian kualitatif sendiri di definisikan sebagai suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti²⁷.

Sedangkan untuk *design* penelitian, penulis menggunakan *case study research*. Study kasus adalah strategi penelitian yang memfokuskan analisisnya terhadap sebuah fenomena atau kasus kontemporer dalam kehidupan nyata, baik itu satu kasus atau lebih yang menitik-beratkan pada pertanyaan *how* atau *why* dan penulis tidak mempunyai control yang besar terhadap kasus tersebut, sehingga bukti dari multisumber perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk mempertegas batas-batas antara kasus dan konteks²⁸.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil temuan

²⁷ Ibrahim Arkian, "Protes Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara Oleh PT. Angkasa Pura 1 Tahun 2014", *Skripsi UMY*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hlm 35

²⁸ Ryana Andryana, "Peranan Komunitas Taring Padi dalam Mengkritik Kebijakan Penambangan Pasir Besi di Kulon Progo", *Skripsi UGM*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm 30

lapangan yang berasal dari hasil interview dengan responden dan hasil pengamatan di lapangan.

Untuk mendapatkan dari primer, penulis mengklasifikasikan aktor-aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan. Aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam UKPWR dan merupakan penggerak atau anggota dari UKPWR

Tabel 1.3

Daftar Wawancara

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Peran
1	Abdul Hakim	Nelayan	Laki-laki	Koordinator UKPWR
2	Roidi	Guru	Laki-laki	Koordinator UKPWR
3	Daspi	Petani	Perempuan	Anggota UKPWR

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung berupa dokumen. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data tambahan yang digunakan sebagai acuan dan elaborasi dari data primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku, dokumen hasil penelitian, informasi dari media massa dan sebagainya.

Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai gerakan sosial untuk memperkuat data primer. Penulis juga menggunakan dokumen hasil penelitian yang berupa skripsi, tesis dan disertasi mengenai gerakan sosial atau penelitian yang membahas mengenai konflik. Dan data sekunder lainnya adalah media massa, didalam media massa penulis akan mendapatkan gambaran gerakan yang dilakukan oleh UKPWR.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan suatu keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan aktor-aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan. Aktor yang potensial untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat langsung UKPWR dan merupakan penggerak atau anggota dari UKPWR.

b. Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lain yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan²⁹.

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan/pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.

4. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam kegiatannya peneliti

²⁹ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", diakses dari <http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/download/55/64>, pada 14/08/2017 pukul 23:41 WIB

tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Analisis data dilakukan sejak dan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa factual dan realistik.

Mengikuti Lincoln dan Gube (2008), data yang dikumpulkan akan divalidasi dengan penggunaan empat kriteria kualitas yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.³⁰ Kredibilitas terkait bagaimana data dipercaya, transferabilitas memperlihatkan konteks yang beragam, dependabilitas diartikan sebagai keterulangan situasi yang sama, dan terakhir konfirmabilitas diartikan bahwa perspektif peneliti tidak seragam. Keempat alat validasi tersebut di atas berbeda dengan kelaziman dalam validasi data kuantitatif yang biasanya meliputi uji validitas internal, eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Artinya, konsistensi metodologi ini juga punya kepentingan terhadap ragam teknik analisis data yang akan digunakan. Sementara itu, teknik analisis data kualitatif sangatlah beragam seperti teknik etnografi ala Spradley, Model linear Miles dan Huberman, model Bogdan dan Bilken, model Grounded seperti teori

³⁰Emzir. Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Rajagrafindo Persada. 2012

Strauss dan Corbin. Dalam hal penelitian ini yang hendak digunakan adalah teknik analisa yang seiring dengan pendekatan kualitatif sebagaimana yang digagas oleh Miles dan Huberman dengan juga memperhitungkan pendekatan lain yang relevan seperti Grounded teori.

Untuk proses analisis digunakan model Strauss dan Corbin yaitu melalui beberapa prosedur sebagai berikut: (1) Koding/reduksi data; (2) tematisasi; (3) penentuan alur cerita; (4) mengembangkan alur cerita dan teoritisasi; (5) analisis dengan menghubungkan tema dengan teori teori yang tersedia dan atau mencari hubungan dengan tema lainnya; (6) penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Untuk bab *pertama*, memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional dan sistematikan pembahasan. Bab *kedua*, berisi tentang settingan politik Kabupaten Batang dan gambaran umum tentang UKPWR dan bab *ketiga* menjelaskan mengenai bentuk perlawanan UKPWR terhadap Pembangunan PLTU batubara dan konflik pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, dan terakhir bab 4, kesimpulan.